

Polri versus Celengan Babi

Oleh Triyono Lukmantoro

Persoalan rekening gendut sejumlah perwira di lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tampaknya, belum mendapatkan jawaban pasti. Hal ini disebabkan pengumuman hasil penyelidikan terhadap rekening yang mengundang kecurigaan publik itu tidak memuaskan. Dari 23 rekening yang mencurigakan, 17 di antaranya dianggap wajar. Polisi pun tidak berani menyebutkan nama serta inisial pemiliknya. Alasannya, jika hasil penyelidikan itu diberberkan secara detail, maka justru pihak kepolisian telah melanggar undang-undang (*Jawa Pos*, 17 Juli 2010).

Pada akhirnya, problem yang seharusnya diselesaikan polisi itu cuma berhenti dalam soal tafsir terhadap karikatur celengan babi. Polisi hanya bisa memperlihatkan sikap gusar terhadap selebar karikatur. Padahal, karikatur, ungkap situs wikipedia, dapat merujuk pada sebuah potret yang melebih-lebihkan atau mendistorsikan esensi dari seseorang atau sesuatu yang menciptakan keserupaan visual, sehingga gampang diidentifikasi. Karikatur berasal dari kata Italia, *caricare*, yang berarti mengisi atau memenuhi. Secara lebih ringkas dapat dikemukakan bahwa karikatur berarti “potret yang terpenuhi”.

Contohnya, penyanyi rock Mick Jagger selalu dikarikaturkan sebagai sosok bertubuh kurus dan bermulut lebar sambil memegang mikrofon. Stevie Wonder, si penyanyi berkulit hitam yang tuna netra, dideskripsikan selalu mengenakan kaca mata hitam yang sedang bermain kibar. Almarhum mantan Presiden Soeharto digambarkan secara karikatural sebagai sesosok bapak yang selalu tersenyum. Setiap identitas yang menjadi ciri khas sang tokoh sengaja ditonjolkan, sehingga publik mudah mengingat.

Setiap karikatur pada prinsipnya berupaya untuk mendeformasi seorang tokoh, profesi, atau suatu benda secara eksektif. Karikatur tidak bermaksud menjadi cerminan dari kenyataan secara transparan. Karikatur merupakan gambar yang menghadirkan kembali atau merepresentasikan realitas secara unik dan kreatif. Tujuan diadakannya karikatur dalam majalah dan koran bisa bermaksud politis atau mengundang kelucuan belaka. Karakteristik karikatur yang menolak sebagai reflektor sempurna dari realitas tersebut seringkali mendatangkan problem komunikasi.

Fenomena itulah yang terjadi dengan Majalah *Tempo* edisi 28 Juni-4 Juli 2010, yang sampul depannya memuat karikatur sesosok polisi yang mengontrol tiga

celengan babi dengan tali mirip *police line*. Pada sampul depan *Tempo* itu juga terdapat judul “Rekening Gendut Perwira Polisi” sebagai hasil laporan investigatif. Tersiar kabar, *Tempo* yang melaporkan sejumlah rekening jenderal polisi berjumlah miliaran rupiah itu diborong sejumlah lelaki berambut cepak dan berbadan tegap. Kehebohan hadir karena kepolisian dianggap memotong jalur distribusi, sehingga arus informasi yang bebas kepada masyarakat terganggu.

Perbedaan tafsir

Kehebohan akibat karikatur dan laporan investigatif *Tempo* itu tidak sekadar berhenti pada persoalan distribusi majalah. Kehebohan meluas pada perbedaan tafsir yang terjadi antara pihak kepolisian dengan *Tempo*. Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan kekecewaannya terhadap gambar sampul itu. Pemimpin tertinggi korps berbaju coklat itu tidak menafsirkan benda yang digiring perwira polisi tersebut sebagai celengan, namun sebagai anggota polisi. “Jangan gambarkan anggota polisi dengan sesuatu yang haram, babi,” tegas Kepala Polri.

Kalangan petinggi kepolisian memberikan tanggapan hampir serupa. Ada yang beranggapan *Tempo* tidak sensitif terhadap polisi, sehingga sebanyak 400 ribu polisi memberikan reaksi keras. Ada pula yang menyatakan sampul *Tempo* bisa melahirkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), karena babi merupakan hewan yang diharamkan untuk agama tertentu. Intinya, karikatur “polisi dan celengan babi” itu dilihat sebagai penghinaan terhadap aparat kepolisian. Karena alasan itu, *Tempo* dilaporkan ke Dewan Pers, bahkan sempat akan dituntut secara perdata dan pidana.

Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*, menyatakan pihaknya tidak memiliki motif melecehkan institusi kepolisian. Apabila ada yang menyamakan polisi dengan babi, tegas Wahyu, adalah kekeliruan besar. Ada empat alasan mengapa *Tempo* memilih celengan babi untuk menyimbolkan beberapa rekening perwira polisi itu. Pertama, celengan berasal dari kata celeng, yang berarti babi hutan. Kedua, sejak zaman Majapahit terakota celengan dalam bentuk babi. Ketiga, *piggy bank* (celengan) juga berbentuk babi. Dan, keempat, desainer grafis *Tempo* yang masih berusia muda mengikuti trend saat ini, misalnya dalam film *Toys Story* yang pemainnya babi.

Perbedaan tafsir adalah problem komunikasi yang sangat biasa. Ketika polisi menginterpretasikan celengan bukan sebagai rekening gendut, melainkan binatang babi, maka rasa tersinggung pun menjulang. Sebaliknya, *Tempo* memaksudkan sosok celengan itu merupakan tempat penyimpanan uang. Celengan babi dimaknai pihak

kepolisian secara denotatif (lugas) sebagai hewan yang diharamkan. Celengan babi dimaksudkan *Tempo* secara konotatif (kias) sebagai rekening yang berisi uang bernilai miliaran rupiah. Tafsir siapakah yang lebih benar dan masuk akal?

Dua mazhab

Pada kajian komunikasi, soal tafsir adalah hal yang sering dibahas. John Fiske (*Introduction to Communication Studies*, 1990: 2-3) menegaskan komunikasi punya dua mazhab. Pertama, komunikasi sebagai transmisi pesan-pesan. Pengirim pesan dan penerima pesan melakukan penyandian dengan memakai media komunikasi. Masalah yang sangat diperhatikan adalah efisiensi dan akurasi. Inilah yang disebut mazhab proses. Ketika celengan babi dimaksudkan *Tempo* sebagai rekening gendut perwira polisi, namun pihak kepolisian memaknainya secara apa adanya sebagai binatang babi, maka proses komunikasi mengalami kegagalan. Kegunaan serta ketepatan pesan tidak bisa didapatkan oleh pihak pengirim pesan (*Tempo*) dan penerima pesan (polisi).

Kedua, komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna-makna. Masalah yang ditekankan adalah bagaimana pesan-pesan, atau teks-teks, berinteraksi dengan khalayak untuk menghasilkan makna-makna tertentu. Kesalahpahaman yang terjadi bukan menjadi bukti bahwa komunikasi mengalami kegagalan. Inilah yang disebut sebagai mazhab semiotika. Peranan pengirim pesan menjadi merosot karena terjadi pergeseran pada bagaimana teks-teks budaya dimaknai. Kalau kepolisian memaknai celengan bukan sebagai rekening, melainkan binatang yang diharamkan, bukan bukti kegagalan komunikasi. Demikian pula jika masyarakat luas memberikan penafsiran yang beraneka ragam tidak pula dianggap sebagai terjadinya kekacauan komunikasi.

Teori semiotika, tegas Katherine Miller (*Communication Theories*, 2005: 13), menyajikan pandangan teoritis tentang mediasi intersubjektif melalui tanda-tanda. Persoalan yang terjadi adalah kesalahpahaman atau kesenjangan di antara berbagai pandangan yang bersifat subyektif. Jadi, interpretasi yang satu tidak dapat dianggap lebih tepat atau paling benar dibandingkan tafsiran yang lain. Apalagi jika tafsiran itu melibatkan latar belakang pekerjaan dan nilai-nilai kultural yang berbeda. Semiotika memang memberikan keleluasaan tafsir karena berprinsip pada permainan tanda.

Namun, jika pihak yang menafsirkan sudah dipenuhi prasangka, kemarahan, dan ketidaksenangan terhadap suatu teks (karikatur), maka penafsiran menjadi luapan kebencian. Itulah problem komunikasi karikatur *Tempo* yang bertutur tentang seorang perwira polisi dan tiga celengan babi. Untuk menyelesaikan persoalan ini dialog di

antara *Tempo* dan kepolisian harus dijalankan. Ini dimaksudkan supaya komunikasi tidak didekati sebagai permainan tanda, tapi proses untuk meraih saling pemahaman. Dialog *Tempo* dengan Polri yang dimediasi Dewan Pers pun sudah berhasil. Kedua belah pihak bersepakat untuk tidak memperpanjang persoalan karikatur itu.

Problem yang masih mengganjal ialah realitas “celengan babi” yang dimiliki sejumlah perwira Polri. Apakah ini hanya soal penafsiran terhadap karikatur sebagai ranah komunikasi yang relatif gampang diatasi? Sebenarnya, apa yang dikehendaki publik adalah transparansi dan kejujuran Polri dalam menangani kasus ini.

* * *

Triyono Lukmantoro, dosen Sosiologi Komunikasi FISIP Undip Semarang.

(Wawasan, 23 Juli 2010)